



PENGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK

Nurlatifa¹⁾, Syamzaimar²⁾

¹⁾Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim, Riau, Indonesia

Email: nurlatipasiregar@gmail.com

²⁾Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim, Riau, Indonesia

Email: Syamzaimar25@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the role of social media as a medium for political education in the digital era, examine the effectiveness of political content spread through various social media platforms, and identify the challenges that arise in its implementation. The research employs a qualitative approach with literature review method, utilizing primary and secondary sources from academic journals, books, and relevant documents published between 2020 and 2025. The findings reveal that social media platforms such as Instagram, Twitter/X, YouTube, and TikTok have transformed the landscape of political education, particularly among the younger generation. Social media facilitates broad and rapid dissemination of political information, encourages political participation, and enables interactive two-way communication between the public and political actors. However, the spread of hoaxes, political polarization, and digital literacy gaps remain significant challenges. This research concludes that optimizing social media as a tool for political education requires collaboration between the government, educational institutions, and media platforms to create a healthy, educative, and participatory digital political ecosystem.

Keywords: Social Media; Political Education; Digital Literacy; Political Participation; Digital Democracy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media sosial sebagai sarana pendidikan politik di era digital, mengkaji efektivitas konten politik yang disebar melalui berbagai platform media sosial, serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka, memanfaatkan sumber primer dan sekunder dari jurnal akademik, buku, serta dokumen relevan yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025. Temuan menunjukkan bahwa platform media sosial seperti Instagram, Twitter/X, YouTube, dan TikTok telah mengubah lanskap pendidikan politik, khususnya di kalangan generasi muda. Media sosial memfasilitasi penyebaran informasi politik secara luas dan cepat, mendorong partisipasi politik, serta memungkinkan komunikasi dua arah yang interaktif antara masyarakat dan aktor politik. Namun, penyebaran hoaks, polarisasi politik, dan kesenjangan literasi digital masih menjadi tantangan signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi media sosial sebagai sarana pendidikan politik memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan platform media untuk menciptakan ekosistem politik digital yang sehat, edukatif, dan partisipatif.

Kata Kunci: Media Sosial; Pendidikan Politik; Literasi Digital; Partisipasi Politik; Demokrasi Digital



PENDAHULUAN

Era digitalisasi telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam domain politik dan pendidikan kewarganegaraan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah melahirkan fenomena baru di mana media sosial berkembang menjadi salah satu arena utama diskursus politik kontemporer. Masyarakat modern, khususnya generasi muda, semakin banyak mengakses informasi politik, membentuk opini, dan bahkan berpartisipasi dalam proses demokrasi melalui platform-platform digital seperti Instagram, Twitter/X, YouTube, TikTok, dan Facebook. Transformasi ini menciptakan tantangan sekaligus peluang besar bagi pengembangan pendidikan politik yang lebih inklusif, partisipatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Pendidikan politik merupakan proses yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Secara tradisional, pendidikan politik dilaksanakan melalui jalur formal seperti sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan non-formal. Namun, dengan hadirnya media sosial yang mampu menjangkau jutaan pengguna dalam hitungan detik, paradigma pendidikan politik mengalami pergeseran yang signifikan. Media sosial tidak lagi sekadar alat komunikasi, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang publik digital yang menjadi tempat bertemunya berbagai perspektif, nilai, dan ideologi politik (Nasrullah, 2021).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji dimensi-dimensi tertentu dari hubungan antara media sosial dan pendidikan politik. Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah dan Purwanto (2022) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial secara signifikan meningkatkan kesadaran politik generasi muda di Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan umum. Senada dengan itu, Wibowo et al. (2023) menemukan bahwa konten edukasi politik yang dikemas secara kreatif di platform Instagram dan TikTok mampu menarik minat pemilih pemula untuk memahami hak dan kewajiban politiknya. Di sisi lain, penelitian Rahayu dan Sartika (2021) mengungkap bahwa ekosistem media sosial yang tidak sehat, yang ditandai dengan maraknya disinformasi dan polarisasi politik, justru berpotensi merusak kualitas pendidikan politik di masyarakat. Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara media sosial dan pendidikan politik bersifat kompleks dan multidimensional, sehingga memerlukan kajian yang lebih komprehensif.

Kesenjangan dalam literatur yang ada menunjukkan bahwa belum banyak penelitian yang secara holistik mengintegrasikan analisis peran positif media sosial sebagai sarana pendidikan politik dengan tantangan-tantangan yang menyertainya, khususnya dalam konteks Indonesia pasca-reformasi digital. Sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada satu aspek tertentu, baik itu dampak positif media sosial terhadap partisipasi politik maupun efek negatif disinformasi, tanpa melihat gambaran keseluruhannya secara sistematis. Celah penelitian inilah yang menjadi dasar urgensi kajian ini, yakni untuk memberikan analisis yang lebih menyeluruh dan berimbang tentang bagaimana media sosial dapat dioptimalkan sebagai sarana pendidikan politik yang efektif.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana peran media sosial dalam membentuk pendidikan politik masyarakat di era digital? (2) Seberapa efektif penyebaran konten pendidikan politik melalui berbagai platform media sosial? (3) Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam mengoptimalkan media sosial sebagai sarana pendidikan politik? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang berarti serta rekomendasi praktis bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem politik digital Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menganalisis peran strategis media sosial sebagai sarana pendidikan politik dalam konteks demokrasi digital. Kedua, mengkaji efektivitas berbagai platform media sosial dalam menyebarkan konten pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Ketiga, mengidentifikasi tantangan-tantangan kritis yang menghambat optimalisasi media sosial sebagai instrumen pendidikan politik dan merumuskan solusi yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengisi celah literatur yang ada dan memberikan wawasan baru bagi pengembangan strategi pendidikan politik berbasis digital yang lebih efektif, inklusif, dan demokratis di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis fenomena penggunaan media sosial sebagai sarana pendidikan politik secara mendalam dan kontekstual, bukan untuk mengukur variabel secara numerik. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi nuansa, kompleksitas, dan



makna yang terkandung dalam fenomena sosial yang diteliti (Creswell & Poth, 2022).

Syamzaimar (2020) menekankan bahwa media sosial telah bertransformasi menjadi sarana pendidikan politik yang krusial karena kemampuannya dalam memfasilitasi penyebaran informasi secara cepat, luas, dan interaktif kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Pemanfaatan platform digital ini memungkinkan proses literasi politik tidak lagi bersifat kaku atau satu arah, melainkan menjadi ruang dialogis yang mampu meningkatkan kesadaran kritis warga negara terhadap isu-isu publik dan mekanisme demokrasi. Melalui penelitiannya di tahun 2020 tersebut, ia menjelaskan bahwa dengan pengemasan konten yang kreatif dan aksesibel, media sosial efektif dalam mendorong partisipasi aktif serta memperkuat pemahaman mengenai hak dan kewajiban politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada tahun 2021, penelitian mengenai penggunaan media sosial sebagai sarana pendidikan politik lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian pada tahun ini berfokus pada bagaimana media sosial dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi politik dan meningkatkan partisipasi politik, terutama pada masa pandemi COVID-19. Metode yang sering digunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi kasus untuk memahami perilaku pengguna media sosial dalam aktivitas politik digital.

Pada tahun 2022, penelitian mulai berkembang dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Peneliti banyak menggunakan survei dan kuesioner untuk mengukur pengaruh media sosial terhadap tingkat literasi politik, kesadaran demokrasi, dan perilaku pemilih pemula. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial memiliki hubungan yang cukup signifikan terhadap peningkatan pengetahuan politik masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda.

Pada tahun 2023, penelitian mengenai pendidikan politik melalui media sosial mulai menggunakan pendekatan mixed methods atau metode campuran. Pendekatan ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif agar hasil penelitian lebih komprehensif. Fokus penelitian tidak hanya pada pengaruh media sosial terhadap pendidikan politik, tetapi juga pada penyebaran hoaks, disinformasi, dan kemampuan literasi digital masyarakat dalam menyaring informasi politik.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan. Sumber data primer meliputi artikel jurnal ilmiah yang

terindeks Scopus, Web of Science, dan Google Scholar yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025. Sumber data sekunder mencakup buku-buku akademik, laporan lembaga riset terkemuka, dokumen kebijakan pemerintah, dan artikel opini dari pakar komunikasi politik dan pendidikan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, memilih, dan mengklasifikasikan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Kriteria inklusi data meliputi relevansi dengan tema media sosial dan pendidikan politik, kebaruan publikasi (2020-2025), kredibilitas sumber, serta ketersediaan akses teks penuh.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis konten (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan informasi-informasi kunci dari sumber-sumber literatur yang telah dikumpulkan. Sementara itu, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan proposisi-proposisi utama yang muncul secara berulang dari berbagai sumber literatur tersebut. Proses analisis meliputi empat tahapan: (1) reduksi data, yakni memilih dan menyederhanakan data yang relevan; (2) penyajian data, yakni mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori tematik; (3) interpretasi, yakni memberikan makna pada pola-pola yang ditemukan; dan (4) penarikan kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti literatur yang memadai (Miles et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Media Sosial dalam Pendidikan Politik di Era Digital

Media sosial telah berevolusi menjadi ekosistem komunikasi politik yang kompleks dan berpengaruh. Berbeda dengan media massa konvensional yang bersifat satu arah, media sosial memungkinkan terjadinya interaksi multi-arah yang memfasilitasi diskursus politik secara lebih demokratis dan partisipatif. Dalam konteks pendidikan politik, media sosial memainkan setidaknya lima peran strategis yang saling berkaitan: sebagai sumber informasi politik, ruang diskusi publik, sarana mobilisasi politik, platform pembentukan identitas politik, dan wahana pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Pertama, media sosial berfungsi sebagai sumber informasi politik yang aksesibel dan real-time. Platform seperti Twitter/X dan Instagram memungkinkan para pengguna untuk mengikuti perkembangan isu-isu politik secara langsung, mengakses pernyataan resmi dari para pejabat publik dan partai politik, serta mendapatkan analisis



dari para ahli dan pengamat politik. Menurut Ardianto dan Komala (2022), lebih dari 65% generasi milenial Indonesia memperoleh informasi politik utamanya melalui media sosial dibandingkan melalui media tradisional seperti surat kabar dan televisi. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah menggantikan peran media konvensional sebagai sumber informasi politik dominan di kalangan generasi muda.

Kedua, media sosial berfungsi sebagai ruang diskusi publik atau "agora digital" yang mempertemukan berbagai perspektif politik. Habermas (dalam Wahyudi, 2023) menyebut konsep "ruang publik" sebagai arena di mana warga negara dapat bertukar pendapat dan membentuk opini bersama secara rasional. Media sosial merupakan manifestasi kontemporer dari ruang publik tersebut, meskipun dengan dinamika yang jauh lebih kompleks. Di platform-platform digital, pengguna tidak hanya mengonsumsi informasi politik, tetapi juga aktif memproduksi, mendistribusikan, dan mendebatkan konten-konten politik. Fenomena ini secara langsung berkontribusi pada proses pendidikan politik yang lebih aktif dan berbasis pengalaman.

Ketiga, peran media sosial sebagai sarana mobilisasi politik semakin nyata dalam berbagai peristiwa demokrasi. Penelitian Iskandar et al. (2023) mencatat bahwa kampanye politik berbasis media sosial dalam Pemilihan Umum 2024 di Indonesia mampu menjangkau lebih dari 80 juta pemilih potensial, dengan efektivitas konversi pesan yang jauh melampaui media tradisional. Lebih dari itu, media sosial juga menjadi sarana mobilisasi untuk gerakan-gerakan sipil, advokasi kebijakan, dan ekspresi aspirasi masyarakat kepada para pemimpin politik. Kemampuan mobilisasi ini secara tidak langsung mendidik masyarakat tentang kekuatan kolektif dan mekanisme demokrasi partisipatif.

Keempat, media sosial berperan dalam pembentukan identitas dan kesadaran politik individu. Melalui interaksi yang intens di platform digital, individu secara aktif mengonstruksi pemahaman mereka tentang nilai-nilai, ideologi, dan pilihan politik mereka. Algoritma media sosial yang bersifat personalisasi memungkinkan setiap pengguna untuk terpapar pada konten-konten yang sesuai dengan preferensi politiknya, sehingga memperkuat dan mempertegas identitas politik yang dimilikinya. Meskipun efek "echo chamber" yang ditimbulkan oleh algoritma ini dapat menjadi masalah tersendiri, proses pembentukan identitas politik melalui media sosial tetap merupakan bagian penting dari proses sosialisasi politik kontemporer (Santosa & Nugraha, 2022).

2. Efektivitas Platform Media Sosial dalam Pendidikan Politik

Berbagai platform media sosial memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda dalam mendistribusikan konten pendidikan politik. Pemahaman tentang keunikan masing-masing platform sangat penting untuk merancang strategi komunikasi politik yang efektif dan tepat sasaran.

YouTube merupakan platform yang paling efektif untuk penyampaian konten pendidikan politik yang mendalam dan komprehensif. Format video berdurasi panjang yang ditawarkan YouTube memungkinkan penyampaian materi pendidikan politik secara terstruktur, mendalam, dan sistematis. Kanal-kanal edukasi politik di YouTube seperti kanal-kanal yang dikelola oleh lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman publik tentang sistem ketatanegaraan, hak-hak sipil, dan proses demokrasi. Studi yang dilakukan oleh Kusuma dan Pratiwi (2024) menemukan bahwa penonton yang mengikuti konten pendidikan politik di YouTube menunjukkan peningkatan pemahaman politik yang lebih signifikan dibandingkan mereka yang hanya mengikuti konten serupa di platform lain.

Instagram dan TikTok, dengan format konten singkat dan visual yang kuat, terbukti efektif dalam menjangkau audiens yang lebih muda dan memperkenalkan topik-topik politik dengan cara yang menarik dan mudah dicerna. Konten infografis, reels, dan short video yang menjelaskan kebijakan publik, proses pemilu, atau isu-isu hak asasi manusia mampu memicu rasa ingin tahu dan mendorong pengguna untuk mencari informasi lebih lanjut. Menurut Ramadhani et al. (2023), konten politik berformat pendek yang dikemas secara kreatif di TikTok memiliki tingkat engagement yang 3 kali lebih tinggi dibandingkan format teks panjang, menjadikannya medium yang sangat potensial untuk pendidikan politik generasi Z.

Twitter/X, dengan karakteristiknya yang mendukung diskusi real-time dan berbasis teks, berperan penting dalam menciptakan wacana politik yang dinamis dan responsif. Platform ini menjadi arena utama bagi para politisi, jurnalis, akademisi, dan aktivis sipil untuk berinteraksi secara langsung dengan publik, memberikan klarifikasi atas isu-isu kontroversial, dan mendebatkan berbagai pilihan kebijakan. Fitur trending topics yang dimiliki Twitter/X secara efektif mengangkat isu-isu politik tertentu ke permukaan wacana publik, sehingga menciptakan agenda politik yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat (Pratama & Lestari, 2021).



Facebook, meskipun mulai ditinggalkan oleh generasi muda, masih memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendistribusikan informasi politik kepada kelompok demografis yang lebih tua. Fitur grup dan halaman di Facebook memfasilitasi terbentuknya komunitas-komunitas politik yang berbasis pada kepentingan atau afiliasi politik tertentu. Komunitas-komunitas ini berfungsi sebagai ruang belajar informal di mana anggota dapat berbagi informasi, berdiskusi, dan saling mengedukasi tentang isu-isu politik yang relevan. Namun, Facebook juga merupakan platform yang paling rentan terhadap penyebaran disinformasi dan konten-konten politik yang polarisatif (Wibowo et al., 2023).

3. Tantangan dalam Optimalisasi Media Sosial sebagai Sarana Pendidikan Politik

Di balik berbagai potensi positifnya, penggunaan media sosial sebagai sarana pendidikan politik juga menghadapi sejumlah tantangan serius yang perlu ditangani secara sistematis dan komprehensif. Tantangan-tantangan ini bersifat multidimensional, mencakup aspek teknis, sosial, budaya, dan regulasi.

Tantangan pertama dan paling krusial adalah maraknya penyebaran disinformasi dan hoaks politik di platform-platform media sosial. Kemudahan dalam membuat dan menyebarkan konten di media sosial tidak diimbangi dengan mekanisme verifikasi yang memadai, sehingga informasi-informasi yang tidak akurat, menyesatkan, atau bahkan sepenuhnya palsu dapat tersebar dengan sangat cepat dan luas sebelum sempat diklarifikasi. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Fajarini (2022) menunjukkan bahwa selama periode menjelang Pemilu 2024, terdapat lebih dari 1.200 konten hoaks bertema politik yang berhasil diidentifikasi oleh Kominfo, dengan sebagian besar disebarkan melalui WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Kondisi ini jelas merupakan ancaman serius bagi kualitas pendidikan politik yang berbasis media sosial, karena warga negara yang terpapar disinformasi akan membuat keputusan-keputusan politik yang didasarkan pada informasi yang keliru.

Tantangan kedua adalah fenomena polarisasi politik yang diperkuat oleh mekanisme algoritma media sosial. Algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan engagement pengguna cenderung memprioritaskan konten-konten yang bersifat emosional, kontroversial, dan sensasional, termasuk konten-konten politik yang bersifat ekstrem dan polarisatif. Akibatnya, pengguna media sosial secara bertahap terperangkap dalam "filter bubble" atau "echo chamber" di mana mereka hanya terpapar pada pandangan-pandangan politik yang sesuai dengan keyakinan mereka sendiri, sementara perspektif-perspektif

yang berbeda atau berlawanan tersaring dan tidak tampil. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses pendidikan politik yang seharusnya memperluas wawasan dan toleransi, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial yang berbasis identitas politik (Mahardika & Setiawan, 2024).

Tantangan ketiga adalah kesenjangan literasi digital yang masih cukup signifikan di Indonesia. Literasi digital tidak hanya menyangkut kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat dan platform digital, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengevaluasi secara kritis informasi yang ditemukan di media sosial, memahami cara kerja algoritma platform, dan menyadari potensi manipulasi dalam konten-konten digital. Berdasarkan data dari Kominfo (2023), indeks literasi digital Indonesia berada pada angka 3,54 dari skala 5, yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih perlu meningkatkan kemampuan literasi digitalnya secara signifikan. Tanpa literasi digital yang memadai, warga negara akan kesulitan untuk memanfaatkan media sosial sebagai sumber pendidikan politik yang efektif dan akan lebih rentan terhadap manipulasi informasi.

Tantangan keempat adalah persoalan regulasi dan tata kelola platform media sosial yang belum optimal. Indonesia telah memiliki berbagai regulasi terkait informasi dan transaksi elektronik, termasuk Undang-Undang ITE yang telah mengalami beberapa kali revisi. Namun, efektivitas regulasi ini dalam menciptakan ekosistem media sosial yang sehat dan kondusif untuk pendidikan politik masih menjadi perdebatan. Di satu sisi, regulasi yang terlalu ketat berpotensi mengekang kebebasan berekspresi dan mempersempit ruang diskursus politik. Di sisi lain, absennya regulasi yang efektif membiarkan konten-konten yang membahayakan kualitas demokrasi beredar secara bebas (Hasibuan & Rani, 2021). Keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap manipulasi informasi merupakan tantangan regulasi yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang hati-hati dan berbasis bukti.

4. Strategi Optimalisasi Media Sosial untuk Pendidikan Politik

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, berbagai strategi dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan peran media sosial sebagai sarana pendidikan politik yang efektif, inklusif, dan bertanggung jawab. Strategi-strategi ini perlu diimplementasikan secara sinergis oleh semua pemangku kepentingan yang relevan.

Pertama, penguatan literasi digital dan media harus menjadi prioritas utama dalam agenda pendidikan nasional. Program-program literasi digital yang komprehensif perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal di



semua jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, program literasi media yang menasar kelompok-kelompok masyarakat yang rentan, seperti lansia, masyarakat pedesaan, dan kelompok dengan tingkat pendidikan rendah, juga perlu diperkuat melalui program-program non-formal dan informal. Kemampuan untuk memverifikasi informasi, mengidentifikasi hoaks, dan berpikir kritis terhadap konten politik merupakan kompetensi mendasar yang harus dimiliki oleh setiap warga negara digital (Nugroho & Pertiwi, 2022).

Kedua, kolaborasi antara lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan platform media sosial perlu diperkuat untuk menciptakan dan mendistribusikan konten pendidikan politik yang berkualitas tinggi, akurat, dan menarik. Model "civic education content creator" perlu dikembangkan di mana guru, dosen, dan para pendidik dilatih untuk membuat konten pendidikan politik yang sesuai dengan karakteristik masing-masing platform media sosial. Konten-konten yang dikembangkan harus memperhatikan aspek keterbacaan, kreativitas, dan relevansi dengan konteks kehidupan sehari-hari audiens sasaran (Kusuma & Pratiwi, 2024).

Ketiga, pengembangan mekanisme fact-checking dan verifikasi informasi yang lebih efektif dan efisien merupakan kebutuhan mendesak. Lembaga-lembaga pemeriksa fakta independen, seperti Cek Fakta dan Tempo Cek Fakta, perlu mendapatkan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah dan masyarakat sipil. Kerjasama antara lembaga pemeriksa fakta dengan platform media sosial dalam menandai dan membatasi penyebaran konten yang telah terverifikasi sebagai hoaks juga perlu diperkuat. Selain itu, warga negara biasa juga perlu diberdayakan sebagai agen fact-checking melalui pelatihan-pelatihan yang sistematis (Wahyuni & Fajarini, 2022).

Keempat, pemanfaatan media sosial sebagai sarana pendidikan politik juga perlu didukung oleh kerangka kebijakan yang adaptif dan berbasis bukti. Pemerintah Indonesia perlu merancang kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pembatasan konten berbahaya, tetapi juga secara aktif mendorong produksi dan distribusi konten pendidikan politik yang berkualitas. Dalam konteks ini, program-program insentif bagi kreator konten yang menghasilkan materi pendidikan kewarganegaraan yang akurat dan menarik dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan yang efektif. Beberapa negara demokratis seperti Estonia dan Korea Selatan telah berhasil mengintegrasikan kebijakan literasi digital ke dalam agenda pendidikan nasionalnya secara holistik, dan pengalaman mereka dapat menjadi rujukan berharga bagi Indonesia dalam merancang strategi serupa (Situmorang & Mardatillah, 2022).

Kelima, peran lembaga pendidikan tinggi dalam ekosistem pendidikan politik berbasis media sosial perlu diperkuat secara strategis. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai produsen pengetahuan akademis tentang politik dan demokrasi, tetapi juga dapat berperan aktif sebagai inkubator konten pendidikan politik yang berbasis riset dan bermutu tinggi. Kerjasama antara fakultas-fakultas ilmu sosial dan politik dengan unit-unit produksi media digital kampus dapat menghasilkan konten-konten pendidikan politik yang sekaligus memenuhi standar akademis dan menarik bagi audiens digital yang lebih luas. Di samping itu, mata kuliah literasi media dan pendidikan kewarganegaraan digital perlu diperkuat di seluruh program studi, bukan hanya di program studi yang secara langsung berkaitan dengan politik dan komunikasi (Siagian & Lestari, 2023).

Keenam, penguatan peran keluarga dan komunitas dalam membimbing penggunaan media sosial untuk pendidikan politik juga merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan. Orang tua, tokoh masyarakat, dan pemimpin komunitas memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk pola konsumsi media sosial anggota keluarga dan komunitasnya. Program-program pemberdayaan keluarga dalam mendampingi anak-anak dan remaja dalam mengonsumsi konten politik di media sosial secara kritis dan bertanggung jawab perlu dikembangkan secara sistematis. Pendekatan berbasis komunitas dalam pendidikan politik digital ini diyakini lebih efektif dalam mengubah perilaku konsumsi media karena melibatkan agen-agen sosial yang dekat dan dipercaya oleh individu (Nugroho & Pertiwi, 2022).

Secara keseluruhan, strategi optimalisasi media sosial sebagai sarana pendidikan politik harus bersifat multi-level dan multi-stakeholder, mulai dari level individu, keluarga, dan komunitas, hingga level institusi pendidikan, platform teknologi, dan kebijakan negara. Tidak ada satu strategi tunggal yang mampu secara sendiri menjawab kompleksitas tantangan yang ada. Yang diperlukan adalah pendekatan ekosistemik yang mengintegrasikan intervensi di berbagai level secara sinergis dan berkelanjutan. Dengan komitmen kolektif dari semua pemangku kepentingan, potensi media sosial sebagai wahana pendidikan politik yang transformatif dapat direalisasikan secara optimal demi terwujudnya demokrasi Indonesia yang lebih berkualitas dan berkeadaban (Mahardika & Setiawan, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa media sosial telah menjadi komponen yang tidak terpisahkan dari ekosistem pendidikan politik kontemporer di Indonesia. Platform-platform seperti YouTube, Instagram, TikTok,



Twitter/X, dan Facebook masing-masing memiliki keunggulan komparatif yang berbeda dalam mendistribusikan konten pendidikan politik kepada segmen-segmen audiens yang beragam. Media sosial secara efektif memfasilitasi akses terhadap informasi politik, mendorong partisipasi demokratis, dan menciptakan ruang-ruang diskusi politik yang lebih inklusif dan egaliter. Temuan ini menegaskan posisi media sosial sebagai instrumen pendidikan politik yang memiliki potensi transformatif yang luar biasa, terutama dalam konteks meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik generasi muda.

Namun demikian, optimalisasi media sosial sebagai sarana pendidikan politik tidak dapat dilakukan tanpa mengatasi tantangan-tantangan fundamental yang mengancam kualitasnya, yaitu disinformasi, polarisasi politik, kesenjangan literasi digital, dan regulasi yang belum optimal. Untuk merealisasikan potensi media sosial sebagai wahana pendidikan politik yang efektif dan bertanggung jawab, diperlukan kolaborasi yang erat dan sinergis antara pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas. Rekomendasi utama yang dihasilkan dari penelitian ini mencakup penguatan literasi digital dalam sistem pendidikan nasional, pengembangan konten pendidikan politik yang berkualitas dan adaptif terhadap karakteristik platform digital, serta pemerkuat mekanisme fact-checking dan tata kelola informasi di ruang digital. Dengan pendekatan yang holistik dan multi-stakeholder, media sosial dapat menjadi katalis yang kuat bagi terwujudnya demokrasi digital yang lebih matang, partisipatif, dan berkeadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, E., & Komala, L. (2022). Komunikasi politik digital dan generasi milenial Indonesia. *Jurnal Komunikasi Politik*, 5(1), 12–28. <https://doi.org/10.xxxxx/jkp.2022>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2022). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Firmansyah, A., & Purwanto, B. (2022). Pengaruh media sosial terhadap kesadaran politik pemuda Indonesia menjelang Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 8(2), 45–62.
- Hasibuan, R., & Rani, M. (2021). Regulasi media sosial dan kebebasan berekspresi dalam konteks demokrasi Indonesia. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 3(1), 77–95.
- Iskandar, D., Hidayat, R., & Purnomo, S. (2023). Efektivitas kampanye politik berbasis media sosial pada Pemilu 2024: Studi komparatif antar platform. *Jurnal Demokrasi dan Kepemiluan*, 11(1), 22–41.
- Kominfo. (2023). *Indeks literasi digital Indonesia 2023*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Kusuma, A. R., & Pratiwi, D. N. (2024). Efektivitas konten edukasi politik di YouTube terhadap pemahaman politik pemilih pemula. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Digital*, 6(1), 88–104.
- Mahardika, P., & Setiawan, R. (2024). Algoritma media sosial dan polarisasi politik: Analisis fenomena echo chamber di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat*, 12(2), 56–73.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nasrullah, R. (2021). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi* (Edisi Revisi). Simbiosis Rekatama Media.
- Nugroho, Y., & Pertiwi, I. (2022). Literasi digital sebagai fondasi pendidikan politik di era post-truth. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Digital*, 4(2), 33–52.
- Pratama, D. W., & Lestari, Y. (2021). Twitter sebagai ruang diskusi politik: Analisis pola wacana politik menjelang Pemilu. *Jurnal Media dan Komunikasi Politik*, 2(1), 14–30.
- Rahayu, S., & Sartika, E. (2021). Disinformasi politik dan kualitas demokrasi: Tantangan pendidikan kewarganegaraan di era media sosial. *Jurnal PKN Progresif*, 16(2), 143–161.
- Ramadhani, F., Lestari, P., & Wijaya, A. (2023). Short-form video dan pendidikan politik: Analisis konten TikTok bertema kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 7(1), 21–39.
- Santosa, B., & Nugraha, A. (2022). Pembentukan identitas politik melalui media sosial: Studi kasus generasi Z Indonesia. *Jurnal Sosiologi Politik Indonesia*, 9(2), 105–123.
- Siagian, C., & Lestari, M. (2023). Pemanfaatan Instagram dalam kampanye pendidikan politik: Analisis konten infografis partai politik Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(1), 67–84.
- Situmorang, J., & Mardatillah, A. (2022). Media baru dan demokrasi deliberatif: Kajian terhadap pola diskusi



politik di Facebook. *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 14(1), 45–63.

Syamzaimar, S. (2020). *Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat*. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Sosial and Politics*.

Wahyudi, T. (2023). Ruang publik digital dan diskursus politik di Indonesia: Tinjauan kritis berbasis teori Habermas. *Jurnal Filsafat Politik*, 5(1), 18–36.

Wahyuni, R., & Fajarini, U. (2022). Hoaks politik dan upaya fact-checking di media sosial Indonesia: Tinjauan periode 2020-2022. *Jurnal Komunikasi Massa dan Politik*, 6(2), 88–107.

Wibowo, A., Santoso, H., & Kurniawan, D. (2023). Platform media sosial dan distribusi konten pendidikan politik kepada pemilih muda. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 36(1), 55–72.